

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA MELALUI SISTEM NOKEN DI DISTRIK MULIA KABUPATEN
PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA
(STUDI KASUS PADA KAMPUNG MULIGAMBUT)**

Estepanus Papua Wens Tom Dedaida
NPP. 29. 1740

*Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: papuadedaida@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the number of people's political participation in the Village Head Election through the noken system in Puncak Jaya Regency, Papua Province. The election of the village head using the noken system is said to be not optimal, because the election uses the noken system, community participation is very lacking and also causes a lot of fraud, including the election of the village head through the noken system, which makes some village heads not develop their area well, because they can be re-elected easily by the way some people cast ballot papers which are far more than the actual number of voters. This study aims to describe and analyze the low level of community political participation and also the factors that influence the level of community political participation in the Village Head Election. The method used in this study is a descriptive method with an inductive approach, and uses data collection techniques in the form of interviews and documentation. The theory used is a form of political participation according to Samuel P. Huntington and Joan Nelson. Based on the results of research and analysis that has been carried out by the author, there are several factors that influence the political participation of the community in the Pilkades through the noken system in Puncak Jaya Regency, Papua Province namely 1) the pandemic factor, where people are still afraid of the pandemic that is in the community, 2) the economic factor, the work that forces the community to not attend the Pilkades, 3) the socialization factor where there is still a lack of innovation in socialization and 4) the weather factor , where a little bit of rainy weather on election day made many residents not come. The author suggests that the government should change the mindset and increase public trust. Maximizing political education and awareness of the importance of Pilkades activities. The government is also advised to innovate by adding programs to socialize the upcoming Pilkades.

Keywords: Political Participation, Noken System, and Village Head Election

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah partisipasi politik masyarakat di dalam pemilihan Kepala Desa melalui sebuah sistem pemilih yang disebut sistem noken di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem noken dikatakan belum optimal, karena pemilihan menggunakan sistem noken ini, partisipasi masyarakat sangatlah kurang dan ada beberapa orang mencoblos kertas suara yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah pemilih yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades melalui sistem noken di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, yaitu 1) Faktor pandemi, dimana masyarakat masih merasa takut dengan adanya pandemi yang sedang berada di masyarakat, 2) Faktor ekonomi, pekerjaan yang memaksa masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan Pilkades, 3) faktor sosialisasi dimana masih kurangnya inovasi dalam sosialisasi dan 4) Faktor Cuaca, dimana sedikit banyaknya cuaca hujan pada saat hari pemilihan membuat banyak warga yang tidak datang. Penulis menyarankan hendaknya pemerintah mengubah pola pikir dan menambah kepercayaan masyarakat. Memaksimalkan pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya kegiatan Pilkades. Pemerintah juga disarankan untuk berinovasi dengan cara menambah program-program dalam melakukan sosialisasi Pilkades yang akan datang.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Sistem Noken, dan Pemilihan Kepala Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik merupakan suatu konsep yang diterapkan di seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, politik adalah istilah yang mengacu pada bagaimana cara mengatur negara, dan cara pemerintah membuat hukum dan aturan. Dalam kehidupan bermasyarakat istilah politik mulanya dikenal pada masa Plato dalam buku yang berjudul politeia yang dikenal dengan dengan istilah republik dan selanjutnya berkembang melalui karya aristoteles yang di kenal dengan politika.

Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, dengan demikian dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan sebagai konsep peraturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintah itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi Negara yang baik. Konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pihak berkepentingan, hukum-hukum dan kebijaksanaan yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan cita-cita. yang hendak di capai (Politik Adalah Konsep Hidup Berkelompok, Ketahui Konsep Dan Ilmunya - Hot Liputan6.Com, n.d.).

Indonesia termasuk dalam sistem politik matasepali. Indonesia merupakan Negara kesatuan dan menganut sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai, dan Indonesia adalah negara yang demokratis. Tujuan dari demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera dengan konsep mengedepankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.

Adapun beberapa prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

- a. Negara Berdasarkan Kostitusi, konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat.
- b. Jaminan Kebebasan Pers, sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah dipilih oleh rakyat.
- c. Kebebasan Berpendapat, setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan.
- d. Pergantian Kekuasaan Berkala, pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil.

- e. Peradilan Bebas dan Tak Memihak, posisi netral sangat di butuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat.
- f. Penegakan Hukum dan Persamaan Kedudukan, setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas.
- g. Jaminan Perlindungan HAM, perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis.

Negara yang demokratis dalam pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat, peran penting masyarakat dalam negara yang demokratis salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi politik berhubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat pada jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang telah terpilih. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dilihat sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Partisipasi politik juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Masyarakat mempunyai peran penting dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (*6 Sistem Politik Yang Wajib Kamu Ketahui / Merdeka.Com, n.d.*).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Di Papua khususnya di wilayah pegunungan tengah biasanya mengikuti kepala suku atau orang yang dihormati untuk menentukan pilihan. Dari 29 kabupaten/kota di Papua, ada 13 daerah yang diperbolehkan untuk menggunakan sistem pemilihan sendiri. Sistem tersebut dinamakan sistem noken. Noken dapat di artikan sebagai tas atau kantong, noken tersebut adalah pengganti kotak suara. Sistem noken tersebut bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia no 7 tahun 2017 pasal 1 tentang pemilihan umum. Hal tersebut menjadi pro kontra bagi para pengamat hukum Indonesia dikarenakan ada beberapa orang yang berpendapat sistem noken dilihat dari perspektif adat dan menolak sistem noken dilihat dari perspektif asas demokrasi dalam pemilihan umum (*sistem noken dalam pemilu di papua, n.d.*).

Sistem noken ini mempunyai dua pola mekanisme yaitu pertama *big man* suara diserahkan atau diwakilkan kepada kepala suku di desa. Kedua noken gantung, noken berfungsi sebagai pengganti kotak suara dan masyarakat dapat melihat langsung surat suara yang telah disepakati masuk ke kantong yang sebelumnya telah ditetapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 35/ PHP.BUP-XVI/2018 secara hukum masih dianggap tidak sah sehingga perlu diulang pemilihan umum. Tetapi

dengan pertimbangan tertentu Mahkamah Konstitusi menetapkan pemilihan dengan menggunakan sistem noken masih dapat di benarkan, tetapi hanya berlaku di daerah tertentu yang belum pernah melaksanakan pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih.

Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan terkait pemilu sistem noken pada pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2014, persoalan noken muncul dengan beberapa khusus antara lain adanya suara yang hilang karena noken, perang suku di Puncak Jaya, pembakaran kantor-kantor di Intan Jaya, pemalangan jalan di Tolikara. Sistem noken pada akhirnya belum terwujud sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemilu melalui sistem noken membuat beberapa oknum kepala daerah tidak membangun daerahnya dengan baik, karena mereka bisa terpilih kembali dengan mudah dengan cara beberapa orang mencoblos kertas suara yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah pemilih yang sebenarnya. Di Kabupaten Puncak Jaya sistem noken ini masih dipakai untuk pemilihan kepala desa (*PEMILU SISTEM NOKEN DALAM DEMOKRASI INDONESIA (Studi Kasus Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)*, n.d.).

Pada saat Pemilihan Kepala Desa Muligambut di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua melalui sistem noken partisipasi masyarakat sangatlah rendah, dikarenakan sebagian besar masyarakat di desa muligambut lebih memilih untuk berkebun, mengurus rumah tangga dan mengurus anak mereka. Jumlah penduduk di Kampung Muligambut, laki-laki berjumlah 1.096 jiwa dan perempuan berjumlah 1060 jiwa dengan jumlah total 2.156 jiwa sedangkan Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kampung Muligambut hanya berjumlah 960 jiwa.

Data jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kampung Muligambut tidak lengkap dikarenakan masyarakat yang berda di Kampung Muligambut kebanyakan masih anak- anak dan sebagian besar masyarakat di belum terdata oleh pihak KPU. Tentunya masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam Pemilihan Kepala Desa, adapun pemilih yang berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Desa Muligambut tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung di Desa Muligambut 2020

No.	Dusun	Jumlah Seluruh Pemilih			Pemilih Menggunakan Hak Pilih			Partisipasi Masyarakat (%)		
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH
1.	Jalan Baru	97	103	200	62	48	110	63,9	46,6	55
2.	Muligambbut	178	192	370	102	97	199	57,3	50,5	53,7

3.	Kota Lama	92	118	210	75	80	155	81,5	67,7	73,8
4.	Jalan Proyek	74	106	180	44	76	120	59,4	71,6	66,6
	JUMLAH	441	519	960	238	301	584	56,2	57,9	60,8

Sumber: KPU Kabupaten Puncak Jaya, 2020

Dari data di atas, Pemilihan Kepala Desa Muligambut, jumlah seluruh pemilih 960 orang. Dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 441 orang dan perempuan dengan jumlah 519 orang. Kemudian untuk pemilih yang menggunakan hak Pemilihan Kepala Desa Muligambut 2020 sebanyak 60,8% atau sebanyak 584 orang. Menandakan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala desa Muligambut

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu dalam konteks kegiatan pemilihan umum kepala kampung daerah setempat. Penelitian Marselina Kareth berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat), menemukan bahwa kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Karetubun di Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, sifat apatis dari tujuan dari penelitian ini adalah Kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Karetubun di Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, sifat apatis dari masyarakat itu sendiri, sosialisasi politik, distribusi surat suara yang masih belum efektif, peran media masa dalam memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, serta kinerja dari komisi pemilihan umum daerah yang masih belum maksimal menyebabkan terjadinya kelesuan serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian Brinda Talenta berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi kasus: Desa Firdaus Estate Kec.Sei Rampah, Kab.Serdang Begadai Tahun 2019) menemukan bahwa Partisipasi masyarakat dalam hal ini dilihat Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat dalam hal ini dilihat cukup rendah dikarenakan keinginan masyarakat untuk ikut tampilnya kembali kepala desa terdahulu dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Kedua calon kepala desa bukan merupakan penduduk asli desa Firdaus Estate, sehingga hal tersebut kurang menarik emosional masyarakat. Faktor pekerjaan juga menjadi alasan masyarakat. Pada akhirnya tidak ada tampilnya penduduk asli desa Firdaus Estate dalam pemilihan kepala desa. Dan penelitian Siti Qulsum, Hanny Purnamasari, dan Ani Nurdiani Azizah berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026 menemukan banyak warga atau masyarakat Desa Purwasari yang masih tidak berpartisipasi dalam pemilihan ini padahal mereka tahu memilih pemimpin ini

penting bagi 5 atau 6 tahun kedepannya, namun mereka tidak memilih dengan berbagai alasan. Dimana dalam hal ini kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat cukup kurang bahkan memang kurang karena mereka kebanyakan tidak sadar akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat.

Kepercayaan kepada pemerintah masyarakat sebagian sudah percaya dan sebagian tidak percaya, masyarakat yang memang tidak percaya karena mereka selalu dikasih janji-janji yang tidak pernah terrealisasikan oleh pemerintah itu sendiri bahkan banyak yang kecewa kepada pemerintah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana dalam konteks penelitian yang dilakukan yakni partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui sistem noken tahun 2020. Dengan metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui serta mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Muligambut Distrik Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif (Erikson,1998). Menggunakan operasional konsep yang ditetapkan oleh penulis untuk mengamati dan mempelajari informasi dari variable yang digunakan, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pengumpulan sumber data yang penulis pakai untuk penelitian ini yaitu dalam bentuk data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini penulis juga memakai instrument lainnya yaitu pedoman wawancara. Dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, dokumentasi. Analisis data yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian antaranya reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada saat penelitian tentang Partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Kampung melalui Sistem Noken di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua akan dibahas. Wawancara dari

narasumber dan dokumen yang berisikan data merupakan hasil yang diperoleh oleh penulis selama penelitian berlangsung.

Penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada bagaimana partisipasi politik dan faktor yang menghambat dalam pemilihan Kepala Kampung Melalui Sistem Noken di distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua serta upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi.

Pada saat Pemilihan Kepala Kampung Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi sangatlah kurang sedangkan jumlah DPT yang dimiliki hanya 960 jiwa. Kepala Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Bapak Tekiles Wonda, S.STP pada saat diwawancara di ruangannya pada tanggal 12 Januari 2022 menyampaikan bahwa: “Pelaksanaan Pemilihan kepala Kampung Muligambut di Distrik Mulia kemarin menjadi saran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya. Pentingnya pelaksanaan Pemilihan menjadi wadah bagi masyarakat dalam memilih Kepada Desa yang amanah dan sesuai dengan suara hati mereka”.

Pembentukan panitia khusus dalam penyelenggaraan Pilkadaes juga termasuk dalam tahapan persiapan pemilihan kepala desa. Peraturan menteri dalam negeri tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pembentukan panitia khusus dalam penyelenggaraan Pilkadaes lebih tepatnya dijelaskan pada pasal 5 ayat, (2) dan (4).

3.1 Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua

Penulis melakukan analisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang membagi partisipasi menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Kegiatan Pemilihan
2. Lobby
3. Kegiatan Organisasi
4. Mencari Koneksi (contacting)
5. Tindak kekerasan (violence)

Teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson memiliki lima dimensi Sehingga penulis menulis tentang bagaimana bagaimana lobbying KPU untuk pemilihan kepala desa, adakah kegiatan organisasi yang dibentuk dalam Pemilihan Kepala Kampung, apakah masih ada tidakan perorangan yang untuk mencari koneksi kepada pejabat serta masih adakah tindak kekerasan

dalam pemilihan tersebut, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala kampung melalui sistem noken di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.

3.2 Hambatan yang dialami pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua

3.2.1 Faktor Pandemi

Pandemi Covid-19 tentu saja menjadi penghalang utama yang menyebabkan terhambatnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pilkades, dimana kurangnya pengetahuan masyarakat akan suasana TPS yang sudah dirancang khusus sesuai dengan protokol covid-19, ditambah sistem pilkades di kabupaten puncak jaya menggunakan sistem pemilihan noken dan itu berdampak kepada pemikiran masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menyebabkan mereka dapat terdampak covid-19.

Langkah yang dilakukan KPU untuk mensosialisasikan TPS sesuai protokol menurut penulis sudah dilakukan dengan maksimal dengan menyebarkan di berbagai media massa cetak.

3.2.2 Faktor Ekonomi

Kampung Muligambut merupakan Kampung yang memiliki kondisi ekonomi dibawah rata rata desa lainnya. Dengan hal tersebut tentu memberikan pengaruh juga dalam tingkat partisipasi politik masyarakat karena pola pikir masyarakat Kampung Muligambut yang merasa untuk tidak datang jika tidak menghasilkan hasil yang pasti, dalam hal ini berbentuk uang. Sebagian masyarakat muligambut mempunyai penghasilan dari berkebun. Pola pikir masyarakat ini tentu sangat berpengaruh pada pilkades Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua menjadikan pilihan masyarakat yang lebih mengutamakan untuk bekerja karena menentukan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Padahal, hak suara yang tidak mereka gunakan memberikan pengaruh besar pada hasil akhir pelaksanaan pilkades Muligambut.

3.2.3 Faktor Cuaca

Faktor cuaca mempengaruhi dalam kegiatan pemilihan dimana menurut narasumber pada hari pelaksanaan pemungutan suara cuaca tak menentu dan terjadi hujan yang cukup deras dan itu menyebabkan masyarakat semakin merasa berat untuk menuju tempat pemungutan suara sehingga itu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan pemilihan melalui sistem noken ini tidak begitu memberikan banyak dampak yang positif karena begitu banyak ditemukan hasil suara yang berbeda ataupun tidak sesuai dengan jumlah dari masyarakat yang terdaftar.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala kampung/desa dalam sistem noken dimana masih ditemukannya tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan sarana prasarana yang kurang mendukung serta pengetahuan politik yang dimiliki masyarakat desa masih sangatlah minim.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian jumlah DPT kampung Muligambut tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada di kampung tersebut. Jumlah DPT yang sedikit seharusnya masyarakat Kampung Muligambut haruslah aktif dalam Pilkades, partisipasi masyarakat pun dinilai sangatlah rendah. Tidak hanya partisipasi pada saat proses pemberian suara, namun juga pada saat proses sosialisasi. Telah terjadi sejak awal masa Pemilihan kepala kampung di Kampung Muligambut dan terus berlanjut sampai saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Kampung Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Pandemi

Pandemi Covid-19 tentu saja menjadi penghalang utama yang menyebabkan terhambatnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pilkades Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, dimana kurangnya pengetahuan masyarakat akan suasana TPS yang sudah dirancang khusus sesuai dengan protokol covid-19 dan itu berdampak kepada pemikiran masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menyebabkan mereka dapat terdampak covid-19.

b. Faktor Ekonomi

Desa memiliki kondisi ekonomi dibawah rata-rata desa lainnya. Dengan hal tersebut tentu memberikan pengaruh juga dalam tingkat partisipasi politik masyarakat karena pola pikir masyarakat desa Muligambut yang merasa untuk tidak datang jika tidak menghasilkan hasil yang pasti, dalam hal ini berbentuk uang.

Pola pikir masyarakat ini tentu sangat berpengaruh Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua menjadikan pilihan masyarakat

yang lebih mengutamakan untuk bekerja karena menentukan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Padahal, hak suara yang tidak mereka gunakan memberikan pengaruh besar pada hasil akhir pelaksanaan Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.

c. Faktor Cuaca

Sedikit banyaknya faktor cuaca mempengaruhi dalam kegiatan pemilihan dimana menurut narasumber pada hari pelaksanaan pemungutan suara terjadi hujan yang cukup besar dan itu menyebabkan masyarakat semakin merasa berat untuk menuju tempat pemungutan suara sehingga itu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Muligambut di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.

Keterbatasan Penelitian. Penulis mengetahui bahwasannya didalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada waktu dan biaya yang dilakukan. Yang mana dalam penelitian ini penulis berfokus pada salah satu wilayah atau tempat yang menjadi salah satu wilayah yang menganut dan masih menggunakan sistem noken pada saat pelaksanaan pemilihan umum.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih belum sepenuhnya penelitian ini dan masih awal dalam penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukannya penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui sistem noken di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya studi kasus Kampung Muligambut

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kamung Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya beserta jajarannya, Kepala Kampung Muligambut, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2021. Metodologi penelitian kualitatif Google Buku. (n.d.)
- Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Lexy J, Moleong. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir. 2011. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.

Prof.Dr.Sugiyono. 2008. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta

pemilu sistem noken dalam demokrasi indonesia (Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua). (n.d.).

sistem noken dalam pemilu di papua. (n.d.). Retrieved September 29, 2021, from <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/12/sistem-noken-dalam-pemilu-di-papua/>

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2021. Metodologi penelitian kualitatif Google Buku. (n.d.)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa

Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 01/Ktsp/KPU Prov.030/2013 tentang Pengertian Sistem Noken.

Pemilu sistem noken dalam demokrasi indonesia (Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua). (n.d.).

Pengertian, fungsi dan sistem pemilihan umum – KPU DIY. (n.d.). Retrieved September 29, 2021.

Sistem noken dalam pemilu di papua. (n.d.). Retrieved September 29, 2021.

Tajudin SH, M. (n.d.). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal PKN*, 3.